



Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan Perempuan

SUMBAR & KALBAR **2** WRI

Tematik Portofolio Proyek:
Perhutanan Sosial, Komoditi
Berkelanjutan (Pemberdayaan
Ekonomi Perempuan)

Bentang Alam:

Kerinci Seblat Sumatera Barat,
Heart of Borneo Kalimantan Barat

Lokasi:

SUMBAR

Kabupaten Pesisir Selatan: Nagari
Barung-Barung Belantai Selatan*
(370 ha), Nagari Kapujan Koto
Barapak* (23 ha)

Kabupaten Solok Selatan: Nagari
Padang Gantiang* (1.264 ha),
Nagari Lubuk Malako* (1.610 ha)

*Desa yang kemungkinan beririsan
dengan PIAPS

KALBAR

Kabupaten Sintang: Desa Riguk

Pelaksana Proyek:

WRI, Perkumpulan PENA, WALHI
Sumbar

Waktu Pelaksanaan:

Juli 2016-Desember 2017

**Jumlah sasaran penerima
manfaat:**

225 orang: 155 perempuan (70%)
dan 70 laki-laki (30%), di 5 desa

Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumberdaya dan kegiatan produksi hutan. Proyek ini diharapkan dapat membangun kapasitas perempuan dalam pengelolaan lahan dan produk hutan bukan kayu (produksi, sisa produksi, dan pembudidayaan); membuka akses pemasaran produk tersebut; menyediakan teknologi efisien untuk mendukung kegiatan produksi.

Proyek ini mendorong peningkatan kehadiran dan partisipasi perempuan dalam rapat lokal, untuk memperoleh infrastruktur yang mendukung kebutuhan harian perempuan dan kegiatan produktif bagi kelompok perempuan. Tujuan ini dicapai melalui kegiatan advokasi terhadap anggaran desa dan pelebagaan *Multi-Stakeholders Forum* (MSF). Hasil utama dari kegiatan ini diharapkan dapat mendokumentasikan praktik-praktik baik dan pengetahuan untuk membuat panduan pelatihan, dan juga berbagai publikasi, seperti *factsheet*, *policy brief*, laporan kegiatan dan referensi lainnya untuk untuk program kedepan.

Peningkatan hak kelola masyarakat lokal (dan perempuan) dalam mengelola hutan dan sumber daya di dalamnya juga akan didorong, melalui pengurusan izin Hutan Kemasyarakatan/Hutan Nagari. Proyek ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal (dan perempuan) untuk dapat menerima manfaat dari kawasan hutan di sekitarnya dan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam merawat hutan. *Output* dari kegiatan ini adalah dipenuhinya dokumen-dokumen pengurusan izin dan skema pengelolaan kawasan Hutan Kemasyarakatan/Hutan Nagari yang mengakui hak kelola perempuan penggarap lahan.

Kontribusi dan *output* dari program peningkatan kapasitas perempuan akan memberdayakan mereka agar dapat menegosiasikan kebutuhan dan prioritasnya melalui advokasi, dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak penggunaan lahan dan pengelolaan hutan, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mencapai kesejahteraan diri dan keluarganya.

Proyek ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat secara keseluruhan dan perempuan, khususnya mengenai bagaimana cara memelihara dan melakukan kegiatan reforestasi dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mengurangi lepasnya emisi karbon ke atmosfer.

Deskripsi Proyek

Proyek ini berada di dalam kawasan lima desa/nagari di Sumatera Barat (Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan) dan Kalimantan Barat (Kabupaten Sintang). Di empat desa tengah dimintakan ijin HKM/Hutan Nagari, yaitu di 2 nagari di Pesisir Selatan dan 2 nagari di Solok Selatan, yang saat ini statusnya kawasan lindung (data Menhut 2013).

Pengelolaan hutan saat ini, yang tidak mempertimbangkan ekosistem yang berkelanjutan, tidak melibatkan masyarakat lokal (dan perempuan), yang merugikan masyarakat lokal dan juga perempuan. Jika terus berlanjut, nantinya hutan hanya akan mendatangkan bencana, sementara masyarakat lokal, termasuk perempuan, tidak memiliki sumber pendapatan lainnya selain mengolah lahan hutan dan sumber dayanya dalam rangka bertahan hidup.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (termasuk perempuan), diperlukan intervensi peningkatan kapasitas, pendampingan dalam proses pengelolaan hutan dan kapasitas kepemimpinan. Hingga hari ini skema pengelolaan

hutan belum mempertimbangkan perempuan sebagai subjek pembangunan yang sama-sama memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Intervensi ini juga ditujukan untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya hutan.

Proyek ini akan memberdayakan perempuan pada tiga level, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas keterampilan perempuan dalam mengelola sumber daya hutan maupun non-hutan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kesejahtraannya.
2. Memampukan perempuan untuk berpartisipasi dalam advokasi anggaran dan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan pengelolaan hutan dalam rangka mendorong mereka untuk menyuarakan kebutuhan dan prioritasnya kepada pembuat kebijakan di tingkat desa dan kabupaten. Dengan demikian, mereka dapat mengorganisasikan dirinya untuk mengadvokasi hak-haknya atas tanah/lahan dan pengelolaan hutan.
3. Memperkuat kepemimpinan melalui fasilitasi proses pengajuan izin perhutanan sosial agar masyarakat lokal (dan perempuan) mendapatkan hak kelola terhadap hutan di sekitarnya. Proses pengajuan izin tersebut dilakukan dengan melibatkan perempuan sebagai salah satu pelaku utamanya, sehingga diharapkan perempuan penggarap lahan menjadi diakui oleh para pemangku keputusan.

Walaupun proyek ini berpusat pada pemberdayaan perempuan, hal ini tidak akan membatasi kemungkinan keterlibatan laki-laki dan anggota kelompok masyarakat lainnya, seperti remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas dan orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda, dan kelompok minoritas lainnya.

Program peningkatan kapasitas ini disusun berdasarkan kajian bentang alam, sesuai dengan adanya kebutuhan untuk menyediakan pengetahuan terkait peningkatan kapasitas dalam pengelolaan hutan dan ekosistem. Harapannya adalah agar perempuan di lokasi proyek akan dapat memahami pengelolaan hutan dan ekosistem, pengelolaan lahan yang lebih produktif, dan pentingnya memelihara lingkungan serta sumber-sumber pangan yang berkelanjutan.

